

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Para ahli geografi Indonesia sepakat untuk menguraikan definisi geografi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan. Untuk menyepakati analisis pendekatan keruangan dalam penelitian wilayah sebagai ciri ilmu dan pengajaran geografi maka kesembilan analisis pendekatan keruangan (*spastial approach*), tersebut adalah (1) analisis pola keruangan (mengabstraksikan obyek kajian, mengabstraksikan sebaran dan menjawab pertanyaan geografis), (2) analisis struktur keruangan, (3) analisis proses keruangan (keterkaitan keruangan), (4) analisis interaksi keruangan, (5) analisis organisasi keruangan, (6) analisis asosiasi keruangan, (7) analisis komparasi keruangan, (8) analisis kecenderungan konsep keruangan, (9) konsep sinergisme keruangan, (Sabari, 2007).

Menurut (Bintarto, 1981), geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik secara fisik maupun menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan (*spastial approach*), pendekatan ekologi (*ecological approach*), dan pendekatan regional (*region complex approach*), untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Secara umum Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan (variasi) keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi.

Konteks geografi dengan pendekatan kompleks wilayah (*geography analysis*) dan spasial menjadi bagian analisis untuk melihat perkembangan suatu wilayah dan selanjutnya akan dijadikan sebagai analisis pertumbuhan dalam konteks (*regional approach*). Sehingga muncul analisis baru dalam konteks geografi ekonomi yang akan menjelaskannya sebagaimana dimaksudkan (Tarigan, 2003) yang menjelaskan bahwa dalam konteks ilmu geografi ekonomi (*economic geography*) pola terjadinya adalah dengan adanya aktivitas ekonomi yang dapat menunjukkan keberadaan suatu kegiatan di suatu lokasi dan

bagaimana wilayah sekitarnya berinteraksi atas kegiatan tersebut dan gejala-gejala dari suatu kegiatan yang bersangkutan paut dengan tempat atau lokasi sehingga ditemukan prinsip-prinsip penggunaan ruang.

Kajian yang fokus pada aspek spasial/ ruang penting dalam menunjang berbagai macam elemen perencanaan fisik maupun pada struktur yang sangat kompleks suatu wilayah, sehingga dapat memberi gambaran mengenai kegiatan didalamnya serta melihat bentuk dan pola ruang yang dapat dijadikan sebagai alternative perencanaan, misalnya dalam perencanaan tata ruang wilayah. Masalah lain yang sering muncul dalam proses perencanaan dan pembangunan wilayah yang dilihat dari aspek ekonomi adalah aspek kesenjangan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya.

Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah dilihat secara keseluruhan sebagai unit ekonomi (*economic entity*) yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang berinteraksi satu sama lain, maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan menentukan usaha pembangunan yang berkelanjutan dan tidak memusnahkan sumberdaya asli, manakala teori dan model pertumbuhan yang dihasilkan dijadikan panduan dasar negara. Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Jadi teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu kriteria yang logis mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi (Boediono, 1992).

Pembangunan daerah yang terjadi pada era orde baru menggunakan sistem administrasi *sentralisasi* yaitu sebuah pembangunan yang diatur oleh pusat langsung, artinya pemerintah pusat mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengelola potensi sumberdaya alam. Berbeda dengan era reformasi yang terjadi saat ini yang menggunakan sistem otonomi daerah atau *desentralisasi* yaitu pemerintah daerah diberi kewajiban penuh dalam mengatur dan mengolah sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Kebijakan otonomi daerah ini dimaksud untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan antar wilayah sesuai dengan keadaan wilayah masing-masing (Fajar, 2010).

Adanya kondisi tiap-tiap daerah yang berbeda menyebabkan strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan antara lain adanya perbedaan potensi sumberdaya dan aktivitas manusia serta pertumbuhan penduduk yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ini hanya terkonsentrasi di daerah pusat saja dan kurang memperhatikan daerah pendukung. Agar pembangunan dapat berjalan dengan seimbang dan lancar maka pemerintah harus memperhatikan semua daerah tanpa ada perlakuan khusus bagi masing-masing daerah.

Pemerintah melalui undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa, perencanaan pembangunan nasional maupun regional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti pola tertentu berdasarkan hasil telaah yang cermat terhadap situasi dan kondisi yang bagus. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan melalui undang-undang No. 22 tahun 1999 revisi menjadi undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang No. 25 tahun 1999 revisi menjadi undang-undang No. 33 tahun 2001 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah. (Kuncoro, 2012)

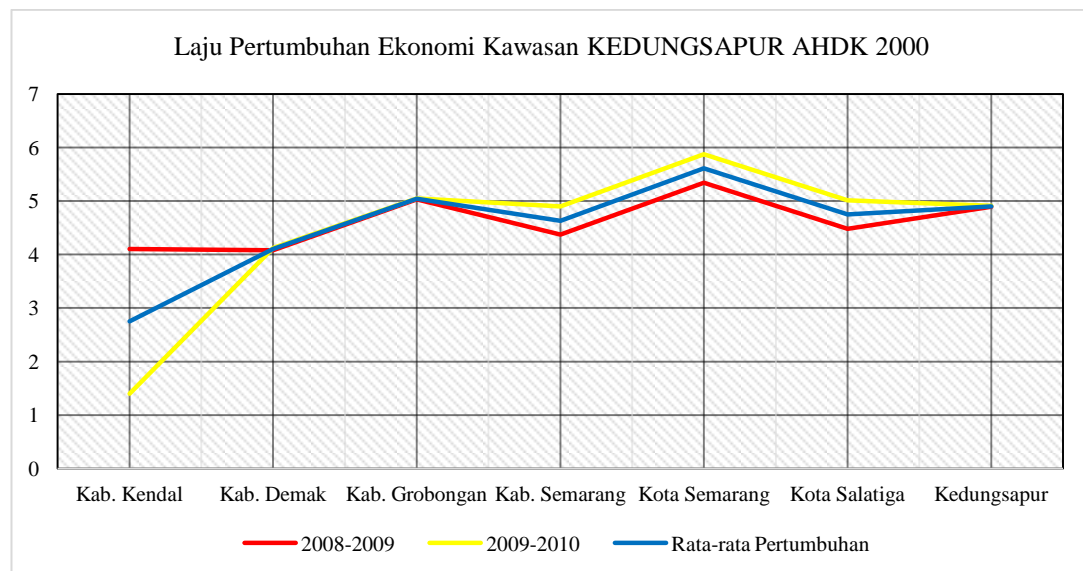
Provinsi Jawa Tengah dengan 35 kabupaten/ kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan enam kota, dengan Kota Semarang sebagai ibu kotanya merupakan satu kesatuan dari administratif, bersinergi dalam melakukan perkembangan dan pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Melalui PERDA Propinsi Jawa Tengah No. 21 Tahun 2003 jucto PERDA Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah, terdapat pada bagian ketiga yaitu Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, pada pasal 100 yang bunyinnnya rencana pengembangan kawasan

startegis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 98 huruf b Bab empat tentang Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan kawasan prioritas yang bersifat strategi ditetapkan dengan skala pandang nasional dan daerah sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya. Salah satunya adalah kawasan KEDUNGSAPUR (Kendal, Demak, Ungaran (Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga dan Purwodadi (Grobogan)).

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) ADHK 2000 Kawasan KEDUNGSAPUR tahun 2008-2010

Kab/ Kota	2008-2009	2009-2010	Rata-rata Pertumbuhan
Kab. Kendal	4,10	1,40	2,75
Kab. Demak	4,08	4,12	4,10
Kab. Grobongan	5,03	5,05	5,04
Kab. Semarang	4,37	4,90	4,63
Kota Semarang	5,34	5,87	5,61
Kota Salatiga	4,48	5,01	4,75
KEDUNGSAPUR	4,89	4,91	4,90

Sumber : *Economics Development Analysis Journal, UNNES 2012*



Gambar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kawasan KEDUNGSAPUR

Dari tabel 1.1 dan grafik 1.1 dapat dijelaskan bahwa Kota Semarang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,61 dan diikuti Kabupaten Grobogan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04.

Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi terendah dimiliki oleh Kabupaten Kendal sebesar 2,75 dan selanjutnya Kabupaten Demak dengan rata-rata laju pertumbuhan 4,10. Adanya tingkat pertumbuhan PDRB yang berbeda-beda pada kabupaten/ kota di kawasan KEDUNGSAPUR, mencerminkan ketidakmerataan dalam pembangunan wilayah, ini merupakan indikator terjadinya ketimpangan wilayah di kawasan tersebut. Hal ini terjadi disebabkan kepemilikan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dari masing-masing kabupaten/ kota berbeda-beda. Baik potensi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) maupun potensi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Pendekatan keruangan menjadi aspek penting dalam penelitian ini, dengan mengkaji dan menganalisis karakteristik pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama dalam ruang kabupaten/ kota di kawasan KEDUNGSAPUR. Selain itu faktor-faktor geografis dapat mempengaruhi distribusi keruangan dari perkembangan ekonomi wilayah, sehingga secara spasial dapat dilakukan analisis lebih mendalam yang disertai dengan perbandingan antara faktor-faktor ekonomi wilayah yang menjadi basis dalam kegiatan perekonomian wilayah.

Tujuan terbentuknya kawasan antar daerah kabupaten/ kota oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah adalah untuk pemerataan pendapatan dalam bentuk kawasan terpadu. Melihat dari penjabaran latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut, adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Spasial Pertumbuhan Ekonomi Kawasan KEDUNGSAPUR (Kendal, Demak, Ungaran, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Purwodadi) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012”

1.2 Perumusan Masalah

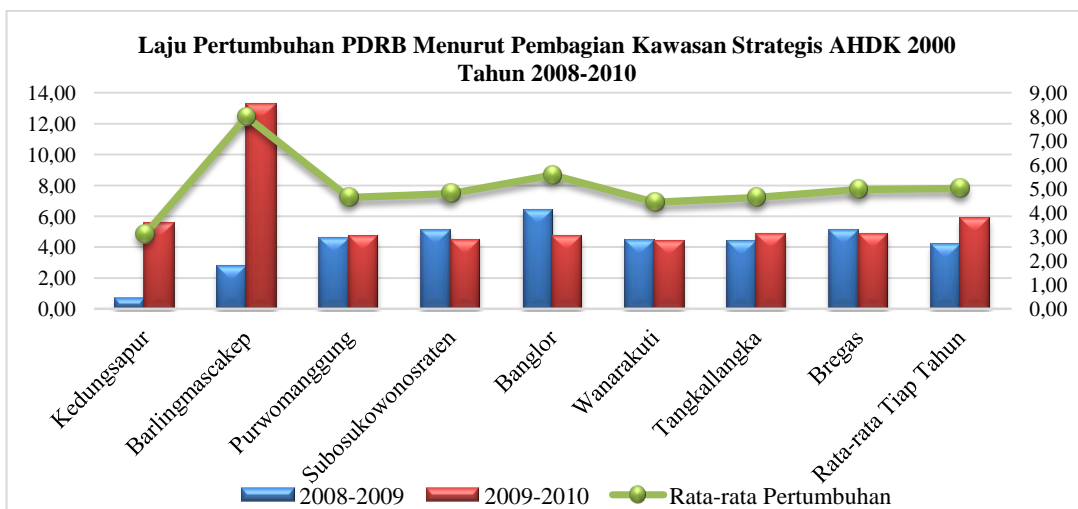
Kondisi dan potensi pertumbuhan ekonomi daerah merupakan modal dasar didalam mencapai sasaran pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi jika suatu pertumbuhan ekonomi wilayah tinggi juga diikuti dengan ketimpangan wilayah (*disparitasnya*) tinggi, ini dapat dilihat pada table 1.2 dan grafik 1.2 yaitu pada tahun 2009-2010 PDRB kawasan KEDUNGSAPUR merupakan tertinggi kedua setelah kawasan BARLINGMASCAKEP, akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi kawasan

KEDUNGSAPUR memiliki rata-rata pertumbuhan terendah dibandingkan dengan kawasan lain.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) ADHK 2000 Antar Pembagian Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012

Kawasan Strategis	2008-2009	2009-2010	Rata-Rata Pertumbuhan
Kedungsapur	0,67	5,53	3,10
Barlingmascakep	2,77	13,24	8,00
Purwomanggung	4,58	4,70	4,64
Subosukowonosraten	5,10	4,49	4,80
Banglor	6,43	4,74	5,58
Wanarakurti	4,45	4,43	4,44
Tangkallangka	4,41	4,86	4,64
Bregas	5,10	4,86	4,98

Sumber : *Economics Development Analysis Journal, UNNES 2012*



Gambar 1.2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Stategis Provinsi Jawa Tengah

Pembagian wilayah dalam satu kawasan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan wilayah. Setiap kawasan memiliki satu daerah yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan yang berperan mendorong pertumbuhan bagi daerah sendiri dan daerah sekitarnya (*hinterland*).

Dalam kasus ini penting untuk dicermati dari perspektif geografi dan analisis keruangan (*spasial*), untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi

kawasan KEDUNGSAPUR, maka dapat diambil beberapa pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi secara keruangan di kawasan KEDUNGSAPUR?
2. Sektor apa yang mempengaruhi pola pertumbuhan ekonomi kawasan KEDUNGSAPUR?
3. Faktor-faktor geografi apa yang mempengaruhi pola pertumbuhan ekonomi di kawasan KEDUNGSAPUR?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan menjabaran yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui pola pertumbuhan ekonomi secara keruangan di kawasan KEDUNGSAPUR.
2. Mengetahui sektor apa yang mempengaruhi pola pertumbuhan ekonomi kawasan KEDUNGSAPUR.
3. Mengetahui faktor-faktor geografi apa yang mempengaruhi pola pertumbuhan ekonomi di kawasan KEDUNGSAPUR.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan maka diharapkan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang sama.

1.5 Telaah Pustaka

Dalam landasan teori ini dijabarkan teori-teori yang mendukung serta membantu dalam memecahkan masalah penelitian.

1.5.1 Pendekatan Keruangan

Istilah pendekatan keruangan merupakan istilah sangat dikenal oleh mereka yang mengenal studi geografi dengan baik, sehingga istilah pendekatan keruangan dijabarkan dalam suatu definisi yang artinya adalah suatu metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang yang dalam hal ini variabel ruang mendapat posisi utama dalam setiap analisis (Sabari, 2009). Istilah ruang merujuk pada makna keluasan yang dapat diartikan secara *absolut* dan *relatif*, arti *absolut* dari ruang diamati secara langsung maupun tidak langsung dipermukaan bumi, sebagai contoh adalah daerah permukiman, daerah persawahan, daerah perkotaan dan kawasan industri yang dapat diamati secara langsung. Sedangkan ruang dalam arti *relatif* merupakan konsep yang diciptakan oleh manusia dan bersifat persepsual semata dan tidak kasat mata, sebagai contoh istilah ruang ekonomi (*economic space*) yang maknanya sangat sulit dicermati oleh kasat mata dan sangat sulit ditentukan oleh batas-batasnya. Namun demikian seorang peneliti akan berusaha membuat batasan-batasan tertentu agar pengertian ruang ekonomi dapat digambarkan dalam peta tematik.

1.5.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Keruangan

Secara geografis pertumbuhan ekonomi pasti tidak seimbang, dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi keruangan tercipta melalui serangkaian sektor atau kutub-kutub yang dominan dalam perekonomian. Friedman dalam (Dickson, dkk. 1992), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi keruangan cenderung terjadi dalam matriks kawasan-kawasan perkotaan, melalui matriks inilah perkembangan ekonomi keruangan diorganisasikan. Penentuan-penentuan lokasi perusahaan, dilakukan dengan mengacu pada kota-kota atau kawasan-kawasan urban. Maka kota-kota merupakan inti kemajuan ekonomi, disekitarnya terdapat wilayah pertanian yang lebih efisien dan di luar lagi terdapat aktivitas-aktivitas mata pencaharian yang kurang maju. Dengan demikian kota dan kawasan kota diidentifikasi sebagai katalisator suatu proses yang didesain untuk melibatkan keseluruhan ruang secara nasional dan regional.

Bantuan akan disalurkan kepada tingkatan pusat-pusat yang lebih kecil dengan daya pengaruh pertumbuhan memusat, perkembangan industri akan menghasilkan suatu aliran investasi yang “menetes ke bawah” melalui hirarki cabang-cabang ekonomi dan keruangan hingga sampai pada pusat-pusat urban yang lebih kecil. Kutub-kutub pengembangan primer yang terdiri dari industri-industri terkait yang diidentifikasi akan didorong perkembangannya dengan suatu jaringan komunikasi yang baik.

Pertumbuhan ekonomi keruangan didalam pembangunan, menyangkut dua konsep utama, yaitu konsep (pusat–pinggiran) dan konsep (kutub pertumbuhan-pusat pertumbuhan) yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Konsep Pusat Pinggiran (*Core-Periphery*)

Konsep pusat pinggiran ini pertama-tama dikemukakan pada tahun 1949 oleh Pebrisch, seorang ahli ekonomi Amerika Latin. Tipe teori pembangunan ini mencoba memberikan gambaran dan menerangkan tentang perbedaan pembangunan (*development*), tetapi penekanannya dari aspek keruangan. Jadi konsep ini sesuai dengan kajian geografi yang juga melihat sesuatu dari segi keruangan. Perbedaan antara daerah pusat (C) dan daerah pinggiran (P) dapat dijumpai dalam beberapa skala di dalam region, antar regions dan antara negara (pelabuhan dan daerah pendukungnya: kota dan desa; kabupaten maju dan kabupaten sedang berkembang).

Dari konsep ini kemudian berkembang menjadi beberapa pandangan teori mengenai perbedaan pembangunan yaitu kemajuan antara pusat dan pinggiran, seperti teori polarisasi ekonomi dari Myrdal dan Hirschman. Menurut Myrdal (*core region*) adalah sebagai magnet yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya, karena adanya sebab-sebab kumulatif ke arah perkembangan (*cumulative upward causation*), seperti arus buruh dari pinggiran ke pusat (P ke C) terkait kebutuhan tenaga trampil, modal dan barang-barang perdagangan yang secara spontan berkembang didalam ekonomi pasar bebas untuk menunjang pertumbuhan di suatu lokasi atau wilayah tertentu (Henderink & Murতোমো, 1988).

2) Konsep Kutub Pertumbuhan dan Pusat Pertumbuhan (*Growth Poles and Growth Centres*).

Pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar daerah belakangnya. Secara geografis pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga mempunyai pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada dikota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut (Tarigan, 2005).

Konsep kutub pertumbuhan diformulasikan pertama oleh Perroux, seorang ahli ekonomi kebangsaan perancis pada tahun 1950. Dalam formulasinya terdapat konsep kutub pertumbuhan, yang terpusat dan mengambil tempat (kota) tertentu sebagai pusat pengembangan yang diharapkan menjalarkan perkembangan kepusat-pusat yang tingkatnya lebih rendah. Dalam konsep ini terdapat istilah penjalaran dan penetesan (*spread dan trickling down*) serta penarikan dan pemusatan (*backwash dan polarization*). Kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak, yaitu sebagai tempat kekuatan-kekuatan memencar (*sentrifugal*) dan kekuatan tertarik kearah pemusatan (*sentripetal*). Pusat pertumbuhan bukan kota atau wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi industri yang dinamis, tercipta didalam dan diantara sektor-sektor ekonomi.

Sedangkan konsep pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Boudeville, seorang ahli ekonomi Perancis. Ia menggunakan konsep kutub pertumbuhan yang sudah ada, dijadikan konsep keruangan yang kongkrit sedangkan pusat pertumbuhan adalah kota-kota atau wilayah perkotaan yang memiliki suatu industri (*propulsive*) yang kompleks. *Propulsive industries* adalah industri yang mempunyai pengaruh besar (baik langsung maupun tidak langsung) terhadap

semua kegiatan lainnya. Menurut (Tarigan 2005) pusat pertumbuhan memiliki empat ciri yaitu:

- a) Adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, contohnya: kehidupan menjadi satu irama dengan berbagai komponen kehidupan kota dan menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan.
- b) Ada efek berganda (*multi effect*), keberadaan sektor-sektor yang saling terkait mendukung akan menciptakan efek berganda, contohnya apabila ada satu sektor atas permintaan dari luar wilayah, produksinya akan meningkat karena ada keterkaitan membuat produksi sektor lain juga meningkat dan akan terjadi perputaran pertumbuhan, sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibandingkan dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut.
- c) Adanya konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang paling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) dari kota tersebut, contohnya orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan, jadi kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu, tenaga dan biaya, hal ini membuat kota tersebut menarik untuk dikunjungi karena volume transaksi yang meningkat akan menciptakan *economy of scale* sehingga tercipta efisiensi lanjutan.
- d) Bersifat mendorong daerah belakangnya, hal ini berarti bahwa antar kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis, contohnya kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri, otomatis kota itu akan berfungsi untuk mendorong belakangnya.

Jadi konsentrasi kegiatan ekonomi dapat dianggap pusat pertumbuhan apabila konsentrasi itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi baik ke dalam (diantara berbagai sektor didalam kota) maupun keluar (ke daerah belakangnya).

1.5.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan menentukan usaha pembangunan yang berkelanjutan dan tidak memusnahkan sumberdaya asli, manakala teori dan model pertumbuhan yang dihasilkan dijadikan panduan dasar Negara. Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karakteristik space terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Jadi teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu kriteria yang logis mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi (Boediono,1992).

Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu ($PDRB_t$) dengan PDRB tahun sebelumnya ($PDRB_{t-1}$):

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi (Yit)} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

Yit : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ kota I, tahun

$PDRB_t$: PDRB Kabupaten/ kota i dan t (PDRB tahun tertentu)

$PDRB_{t-1}$: PDRB Kabupaten/ kota i tahun $t-1$ (PDRB satu tahun sebelumnya)

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat yaitu:

a. *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB)

Pengertian PDRB menurut (BPS, 2004) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi disuatu tempat.

b. Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Bruto Perkapita baik tingkat nasional atau daerah adalah jumlah PDB nasional atau PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk

negara maupun di daerah yang bersangkutan atau dapat disebut sebagai PDB atau PDRB rata-rata (Tarigan, 2005).

$$\text{PDRB Perkapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

c. Pendapatan Regional Atas Harga Dasar Konstan

Seperti telah diketahui bahwa angka-angka pendapatan regional atas harga konstan adalah sangat penting untuk melihat pertumbuhan riil dari tahun ke tahun bagi setiap agregat ekonomi. Agregat ekonomi yang dimaksud adalah PDRB, nilai tambah sektoral, komponen penggunaan PDRB dan pendapatan regional (BPS, Provinsi Jawa Tengah, 2013)

1.5.4 Teori Pembangunan Ekonomi

Sadono Sukirno (1985) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi juga berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan per kapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian didalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Berikut ini dikemukakan beberapa faktor ekonomi yang penting mempengaruhi dan bahkan sering kali sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut menurut (Kamaludin, 1998).

a. Sumber Daya Alam

Yang dimaksud sumber daya alam atau tanah meliputi luas dan kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, sumber mineral, iklim, sumber daya air, sumber lautan dan sebagainya. Dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting ketersediaan sumber daya alam yang melimpah atau yang cukup besar adalah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Dengan adanya kekurangan sumber daya alam disuatu negara berakibat sulitnya atau tidak akan dapat terlaksanannya perkembangan dan kemajuan ekonomi dengan cepat dan mantap.

b. Sumber Daya Manusia Atau Tenaga Kerja

Sumber daya manusia yang merupakan tenaga kerja dalam proses produksi dan pembangunan memegang peranan yang penting pula. Dalam hal ini peranan sumber daya manusia tersebut dalam proses produksi dan pembangunan pertama-pertama ditentukan oleh jumlah (kuantitas) maupun mutu (kualitas) tenaga kerja yang tersedia.

c. Permodalan dan Akumulasi Modal

Modal atau permodalan merupakan persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat dihasilkan maupun direproduksi. Jika stok modal tersebut meningkat dalam jangka waktu tertentu dikatakan terjadi akumulasi modal atau pembentukan modal. Pembentukan modal merupakan kunci utama bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Disatu pihak ia mencerminkan permintaan efektif dan pihak lain ia menciptakan efisiensi produktif bagi proses produksi terutama untuk masa depan.

d. Tenaga Manajerial dan Organisasi

Organisasi produksi merupakan bagian penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Organisasi ini berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian dan pembangunan. Organisasi ini bersifat melengkapi atau komplementer terhadap tenaga kerja dan modal serta membantu meningkatkan produktivitasnya.

e. Kemajuan dan Pemanfaatan Teknologi

Kemajuan teknologi termasuk pemanfaatannya merupakan faktor yang penting dan menentukan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dan perubahan atau kemajuan teknologi tersebut telah dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal dan faktor produksi lainnya.

f. Pembagian Kerja dan Perluasan Skala Produksinya

Pembagian kerja dan spesialisasi dalam proses produksi akan menimbulkan peningkatan produktivitas. Kedua hal ini akan membawa perubahan kearah usaha produksi skala besar. Yang selanjutnya akan dapat membantu perkembangan dan kemajuan produksi dan industri serta pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

1.5.5 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi lokal berorientasi pada proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru dan transformasi pengetahuan (Adisasmita, 2005).

Secara esensial pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat dan menggunakan sumber daya kelembagaan yang berbasis masyarakat sekarang yang berpotensi ekonomi, diperlukan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki untuk merancang dan melaksanakan pembangunan ekonomi lokal.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

1.5.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, serta sebagai dasar berbagai analisa perekonomian. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sistem spasial suatu bangsa atau negara. Ada beberapa variabel yang dapat dipilih sebagai indikator atau pengukuran pertumbuhan ekonomi antara lain (1) PDRB, (2) pendapatan perkapita 3) jumlah penduduk, dan 4) lapangan kerja.

Pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu peningkatan dalam kemakmuran suatu wilayah, disini pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan suatu keluaran wilayah, peningkatan ini meliputi baik kapasitas produksi ataupun volume riil produksi (Adisasmita, 2005).

Pertumbuhan ekonomi juga dapat dinyatakan sebagai peningkatan dalam sejumlah komoditas yang dapat digunakan atau diperoleh disuatu wilayah. Konsep ini menyangkut pengaruh perdagangan yaitu dapat diperolehnya komoditas sebagai suplai hasil akhir yang yang meningkat melalui pertukaran antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi disuatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut (Tarigan, 2004).

Suatu daerah akan mengimpor modal jika tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestik terhadap modal. Apabila tiap daerah dimisalkan menghasilkan *output* yang homogen dan fungsinya produksi yang identik maka didaerah yang K/L-nya tinggi terdapat upah riil yang tinggi dan *marginal productivity of capital* (MPK) yang rendah, adapun yang K/L-nya rendah terdapat upah riil yang rendah tetapi *marginal productivity of capital*

(MPK) yang tinggi. Sebagian akibatnya modal akan mengalir dari daerah yang upahnya tinggi ke daerah yang upahnya rendah, karena akan memberikan balas jasa (untuk modal) yang tinggi. Sebaliknya tenaga kerja akan mengalir dari daerah upah tenaga kerja rendah ke daerah upah tenaga tinggi (Tarigan, 2004).

1.5.7 Teori Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Dengan Pembangunan Wilayah

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pertama kali dikemukakan oleh Simon Kusnets. Dalam Todaro (2009) Kusnets mengatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan berbentuk kurva *U-Shape* terbalik. Dasar dari hipotesis Kusnetz adalah ketimpangan yang rendah yang terjadi dipedesaan dengan sektor yang mendominasi adalah pertanian dibandingkan dengan perkotaan yang didominasi oleh sektor jasa dan industri yang tingkat ketimpangan pendapatannya tinggi. Ia mengatakan, terjadi transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor jasa.

Suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata di seluruh lapisan masyarakat.

Hoover dan Fister dalam Sirojuzilam dan Mahalli (2011) tahapan perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah (*regional Stage of development*), sebagai berikut:

1. Tahap pertama, perekonomian wilayah/ penduduk sangat tergantung kepada hasil alam dan sektor pertanian,
2. Tahap kedua, wilayah mulai mengembangkan spesialisasi lokal dan perdagangan seiring dengan perbaikan transportasi, antara lain dicirikan dengan mulai munculnya industri sederhana di pedesaan,
3. Tahapan ketiga, sudah mulai terjadi perdagangan antar wilayah, antara lain dicirikan dengan perubahan sektor pertanian ke perkebunan,
4. Tahapan keempat, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan berkurangnya pendapatan di sektor pertanian/ perkebunan maka wilayah

didorong untuk bergerak ke arah industrialisasi sekunder, antara lain: pertambangan, industri pengolahan makanan, industri pengolahan kayu, industri pengolahan bahan setengah jadi.

5. Tahapan kelima, wilayah menghususkan diri pada industri berorientasi ekspor (ekspor modal, tenaga ahli, jasa pelayanan kepada daerah belakangnya).

1.6 Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya

No	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Analisis Spasial Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Kedungsapur Tahun 2008-2012 (Zuswanto Fak. Geografi, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB - Pendapatan Perkapita - Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Ekonomi - <i>Indeks Williamson</i> - <i>Tipologi Klassen</i> - LQ - Analisis Spasial (Pendekatan Komparasi Keruangan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola pertumbuhan ekonomi kawasan KEDUNGSAPUR. 2. Sektor pertumbuhan ekonomi kawasan KEDUNGSAPUR 3. Faktor geografis yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kawasan KEDUNGSAPUR.
2	Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Dan Kabupaten Kebumen Tahun 1996-2000 (Ahmad Salihabrur, 2002)	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB - PDRB Perkapita - Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Indeks Williamson</i> - <i>Indeks Entropy Theil</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan tipologi kelas, daerah/ Kecamatan di Kabupaten Banyumas Dapat Diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan perkapita menjadi empat kelompok yaitu kecamatan yang maju tapi tertekan, kecamatan yang berkembang cepat dan kecamatan tertinggal 2. Pada periode pengamatan 1993-2000 terjadi kecenderungan peningkatan peningkatan ketimpangan
3	Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang Periode 2000-2004 (Widya Puspita Ayu, 2008)	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB - PDRB perkapita - Jumlah Penduduk - Laju pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tipologi Klassen</i> - LQ - <i>Shirt share</i> - <i>Indeks Williamson</i> - <i>Indeks Theil</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil dari Tipologi Klassen adalah kecamatan yang termasuk pada kuadran I yaitu Kec. Pringapus dan Kec. Bergas. Pada kuadran II yaitu Kec. Unggaran dan Kec. Pabelan. Kudran III terdapat Kec. Tuntang,

				<p>Kec.Jambu dan Kec.Unggaran, sedangkan kuadran IV yaitu Kec. Suruh, Kec.Banyubiru, Kec.Ambarawa, Kec.Bawen, Kec.Sumowono, Kec.Getasan, Kec.Bringin, Kec.Bancak, Kec.Kaliwunggu dan Kec. Susukan</p> <p>2. Nilai rata-rata indeks Williamson Kabupaten Semarang adalah 0,533 sedangkan nilai rata-rata indeks Entropy Theil sebesar 18,344.</p> <p>3. LQ tiap kecamatan di Kabupaten Semarang kebanyakan bersektor basis pada pertanian, sedangkan sector industry merupakan sektor basis di empat kecamatan dari 17 kecamatan di Kabupaten Semarang.</p>
--	--	--	--	--

1.7 Kerangka Penelitian

Kebijakan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 revisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah (pemerintah daerah), dewasa ini meningkatkan motivasi daerah untuk memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi melalui pemberdayaan potensi ekonomi lokal. Upaya suatu daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi terkadang menjadi sebuah dilema karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diimbangi dengan meningkatnya tingkat disparitas (ketimpangan wilayah). Salah satu kebijakan Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan membentuk kawasan kerjasama strategis yang ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam kawasan tersebut, serta sebagai upaya pemerataan pembangunan. Salah satu dari hasil kebijakan tersebut adalah terbentuknya kawasan KEDUNGSAPUR (Kendal, Demak, (Semarang) Ungaran, Kota Semarang, Kota Salatiga dan (Grobogan) Purwodadi).

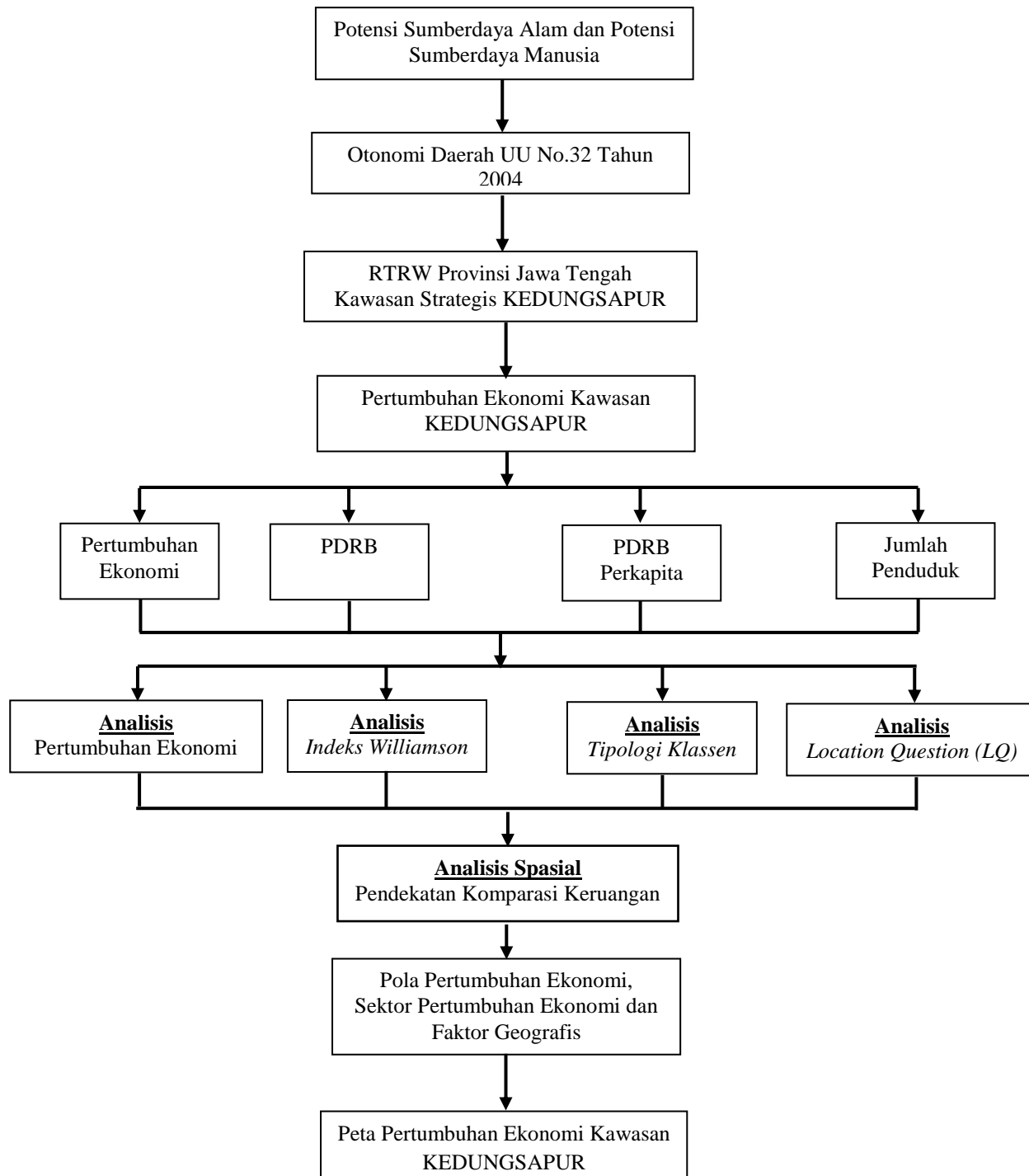
Namun jika dilihat dari potensi masing-masing daerah akan memiliki perbedaan, hal ini terjadi disebabkan kepemilikan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dari masing-masing kabupaten/ kota berbeda-beda. Baik potensi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) maupun potensi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah, sedangkan keunggulan kompetitif adalah kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya dari luar daerah/ luar negeri/ pasar global (Tarigan, 2005),

Seiring dengan kemajuan teknologi serta era keterbukaan informasi, akses informasi menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk ilmu geografi yang berperan memberikan dan menyajikan informasi spasial, baik bersifat nasional maupun regional, pada bidang perencanaan wilayah maupun geografi manusia (budaya, sosial, ekonomi, sumberdaya alam dan politik). Maka sangatlah penting peran pendekatan keruangan dalam membantu analisa keruangan, kewilayahan dan kelingkungan.

Penggunaan variabel pertumbuhan ekonomi , *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB), pendapatan perkapita, serta jumlah penduduk, maka dapat diketahui distribusi pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/ kota di kawasan KEDUNGSAPUR. Dengan menggunakan kolaborasi metode analisis keruangan (pendekatan komparasi) dan metode analisis ekonomi pembangunan (pertumbuhan ekonomi, *Indeks Williamson*; ketimpangan wilayah, *Tipologi Klassen*; percepatan pembangunan dan *Location Question*: sektor Potesial), maka dapat diketahuai pola pertumbuhan ekonomi, sektor pertumbuhan ekonomi dan faktor geografisnya.

Pendekatan keruangan menjadi aspek penting dalam penelitian ini, dengan mengkaji dan menganalisis karakter pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama dalam ruang kabupaten/ kota di kawasan KEDUNGSAPUR. Selain itu faktor-faktor geografis dapat mempengaruhi distribusi keruangan atau spasial dari perkembangan ekonomi wilayah, sehingga secara spasial dapat dilakukan analisis

lebih mendalam yang disertai dengan perbandingan antara faktor-faktor ekonomi wilayah yang menjadi basis dalam kegiatan perekonomian wilayah.



Sumber : Penulis

Gambar 1.3 Bagan Alir Kerangka Penelitian

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif dan data sekunder dengan memberikan gambaran wilayah penelitian sesuai dengan kondisi daerah secara detail sesuai dengan unit analisisnya (Consuelo, 1993). Adapun penggambarannya adalah berupa obyek tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi wilayah antar kabupaten/ kota di kawasan KEDUNGSAPUR dengan mendeskripsikan objek tersebut dengan analisis spasial, yaitu menggunakan data sekunder yang diambil dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan merupakan data time series dengan interval lima tahun yaitu dari tahun 2008-2012, sedangkan unit analisisnya menggunakan unit analisis kabupaten/ kota.

1.8.1 Metode Analisis

Setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan sektor atau komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan atau kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Karena untuk analisis pertumbuhan ekonomi kawasan KEDUNGSAPUR, maka digunakan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif, pendekatan analisis kuantitatif ini berangkat dari data untuk diproses menjadi informasi yang bermanfaat (Kuncoro, 2001), sedangkan untuk pendekatan kualitatif (deskriptif kualitatif) dengan memberikan gambaran wilayah penelitian sesuai dengan kondisi daerah secara detail sesuai dengan unit analisisnya (Consuelo, 1993).

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan potensi perekonomian suatu wilayah. Pendekatan tersebut diantaranya adalah analisis spasial, analisis pertumbuhan ekonomi, analisis *Indeks Williamson (IW)*, analisis *Typologi Klassen* dan *Location Quotient (LQ)*.

a. Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan menentukan usaha pembangunan yang

berkelanjutan dan tidak memusnahkan sumberdaya asli, manakala teori dan model pertumbuhan yang dihasilkan dijadikan panduan dasar Negara.

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Jadi teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu kriteria yang logis mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi (Boediono, 1992).

Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu ($PDRB_t$) dengan PDRB tahun sebelumnya ($PDRB_{t-1}$)

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi (Yit)} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

Yit : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ kota I, tahun

$PDRB_t$: PDRB Kabupaten/ kota i dan t (PDRB tahun tertentu)

$PDRB_{t-1}$: PDRB Kabupaten/ kota i tahun $t-1$ (PDRB satu tahun sebelumnya)

b. Analisis Ketimpangan Wilayah (*Indeks Williamson*)

Indikator yang digunakan untuk menganalisis ketimpangan antar wilayah diantaranya: PDRB, pendapatan perkapita, kontribusi tiap sektor terhadap PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal. Dalam perspektif antar wilayah, ketimpangan pembangunan yang terjadi antar wilayah di suatu daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Menurut (Syafrizal, 2008) ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan daerah ini yang pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju (*developregion*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*).

Adapun penyebab–penyebab ketimpangan pembangunan ketimpangan antar wilayah menurut Syafrizal (2008), yakni :

1. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relative murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih rendah.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor lainnya yang juga mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan stuktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relative rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah. Kurangnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

3. Kosentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya kosentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah di mana terdapat kosentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kosentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena adanya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi kosentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

4. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi jika sebaliknya di mana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi dan dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan perkapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut.

Indeks Williamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat *Disparitas* antar wilayah. Williamson (1975) mengembangkan indeks kesenjangan wilayah yang diformulasikan sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum (y_i - \bar{Y})^2 f_i / n}}{\bar{Y}}$$

Keterangan:

- V_w : Indeks kesenjangan *Williamson* (I_w)
 Y_i : PDRB perkapita wilayah daerah i
 \bar{Y} : Rata-rata PDRB perkapita provinsi
 f_i : f_i/n , dimana f_i jumlah penduduk kabupaten/ kota ke- i dan n adalah
 n : Jumlah penduduk provinsi

Pengukuran didasarkan pada variasi hasil-hasil pembangunan ekonomi antar wilayah yang berupa besaran PDRB. Kreteria pengukuran adalah semakin besar nilai indeks yang menunjukkan variasi produksi ekonomi antar wilayah semakin besar pula tingkat perbedaan ekonomi dari masing-masing wilayah dengan rata-ratanya, sebaliknya semakin kecil nilai ini menunjukkan pemerataan antara wilayah yang baik.

Pengukuran *Indeks Williamson* dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan penimbang. Dengan adanya penimbang tersebut, walaupun suatu daerah mempunyai PDRB perkapita yang ekstrem tinggi, namun kalau jumlah penduduknya relative kecil, maka tidak akan terlalu menyebabkan kesenjangan terlalu tinggi. Sebaliknya walaupun besaran PDRB perkapita suatu wilayah hanya moderat saja dibandingkan wilayah lain yang kecil, namun kalau jumlah penduduknya relative besar maka akan menyebabkan kesenjangan secara keseluruhan.

Indeks Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika semua $Y_i = \bar{Y}$ maka akan menghasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya kesenjangan ekonomi daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat kesenjangan antar kabupaten di suatu provinsi (Ernan Rustiadi, dkk, 2011).

Angka *Indeks Williamson* berkisar antara nol sampai dengan satu:

$IW < 0,4$	artinya tingkat ketimpangan rendah
$0,4 < IW < 0,5$	artinya tingkat ketimpangan moderat
$IW > 0,5$	artinya tingkat ketimpangan tinggi

Ketimpangan wilayah Ketimpangan antar wilayah pada umumnya terjadi karena perbedaan *endowment factor* yang dimiliki masing daerah, yakni faktor demografi dan faktor potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap masing-masing daerah. Selain itu masih banyak faktor-faktor lain dari penyebab ketimpangan antar wilayah.

c. Analisis Tipologi Ekonomi Wilayah (*Tipologi Klassen*)

Analisis *Tipologi Klassen* digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur ekonomi masing-masing daerah. Perbedaan pertumbuhan ekonomi akan membawa masing-masing daerah membentuk suatu pola pertumbuhan dimana dapat digolongkan dalam klasifikasi tertentu untuk mengetahui potensi relatif perekonomian suatu daerah. Dengan menggunakan alat *Tipologi Klassen* serta pendekatan wilayah/ daerah, dapat mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) per kapita daerah.

Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal. Seperti pada pendekatan pertama, pendekatan wilayah juga menghasilkan empat klasifikasi kabupaten yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda yaitu :

1. Daerah Bertumbuh Maju dan Cepat (*Rapid Growth Region*)

Daerah maju dan cepat tumbuh (*rapid growth region*) adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah ini merupakan merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang

sangat besar dan telah dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat. Karena diperkirakan daerah ini akan terus berkembang dimasa mendatang.

2. Daerah Maju Tapi Tertekan (*Retarded Region*).

Adalah daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

3. Daerah Berkembang Cepat (*Growing Region*).

Pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena itu dimasa mendatang daerah ini diperkirakan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

4. Daerah Relatif Tertinggal (*Relatively Backward Region*)

Adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang berada dibawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa didaerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya (Syafrizal, 1997, dalam kuncoro, 2002).

Tabel 1.4 *Tipologi Klassen* Ekonomi Wilayah

PDRB Perkapita (Y)		
Laju Pertumbuhan (r)	$y_j/Y_n > 1$	$y_j/Y_n < 1$
$r_j/R_n > 1$	Daerah bertumbuh maju dan cepat (<i>rapid growth region</i>)	Daerah berkembang cepat (<i>Growing Region</i>).
$r_j/R_n < 1$	Daerah maju tapi tertekan (<i>Retarted Region</i>).	Daerah Relatif Tertinggal (<i>Relatively Backward Region</i>)

Dimana:

Y_j : Pendapatan per kapita rata-rata wilayah Kabupaten i

Y_n : Pendapatan per kapita rata-rata Provinsi

R_j : Laju pertumbuhan PDRB rata-rata Kabupaten i

R_n : Laju pertumbuhan PDRB rata-rata Provinsi

d. Analisis Basic LQ (*Location Question*)

Analisis Basic LQ merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai kemampuan sektor-sektor pembangunan di suatu wilayah dalam mendukung proses pembangunan di daerah atau kawasan. Metode ini dilakukan dengan membandingkan kemampuan sektor-sektor pembangunan dalam suatu daerah atau wilayah dengan kondisi sektor-sektor pembangunan yang ada di daerah yang lebih luas, selain itu *Location Question* (LQ) dapat mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan indikasi sektor basis dan non basis.

Location Quotient Analysis dapat didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktivitas pada subwilayah ke-i terhadap persentase aktivitas total wilayah yang diamati. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah: 1) kondisi geografis relative seragam, 2) pola-pola aktivitas bersifat seragam, 3) setiap aktivitas menghasilkan produk yang sama. LQ juga menunjukkan efisiensi relative wilayah, serta terfokus pada substitusi impor yang potensial atau produk dengan potensi ekspansi ekspor. Hal ini akan memberikan suatu

gambaran tentang industri mana yang terkonsentrasi dan industri mana yang tersebar (Shukla, 2000 dalam Rustiadi, dkk, 2011).

Analisis ini dilakukan berdasarkan data PDRB ADHK 2000 menurut lapangan usaha dari masing-masing kabupaten dan kota kawasan KEDUNGSAPUR. Dalam penelitian ini, penerapan rumusan matematis analisis pembagian lokasi adalah sebagai berikut:

$$LD_{ij} = \frac{X_{ij} / X_i}{X_{.j} / X_{..}}$$

Dimana :

LD_{ij} : *Location Quotion* dari aktivitas sektor i di wilayah kabupaten/kota di kawasan KEDUNGSAPUR

X_{ij} : Total PDRB di kabupaten atau kota ke-i dalam kawasan KEDUNGSAPUR

X_i : Total PDRB kabupaten/kota di kawasan KEDUNGSAPUR

$X_{.j}$: Total sektor ke-j di semua wilayah (Provinsi Jawa Tengah)

$X_{..}$: Total PDRB Provinsi Jawa Tengah

Hasil analisis pembagian lokasi tersebut diinterpretasikan sebagai berikut:

Jika $LQ_{ij} > 1$ disebut **SEKOR BASIS**, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi dari pada tingkat wilayah yang lebih luas, berarti sektor/ sub sektor menjadi unggulan

Jika $LQ_{ij} < 1$ disebut **SEKTOR NON BASIS**, yaitu sektor yang tingkatan spesialisasinya lebih rendah dari pada tingkat wilayah yang lebih luas, berarti sektor/ sub sektor unggulan dan kurang potensial

Jika $LQ_{ij} = 1$ tingkat spesialisasi kawasan perencanaan sama dengan wilayah yang lebih luas, berarti sektor/ subsektor tertentu di Kabupaten sama dengan sektor/ subsektor ditingkat Provinsi

Analisis LQ bisa dibuat menarik apabila dilakukan dalam bentuk time series/ trend, artinya dianalisis untuk beberapa kurun waktu tertentu. Dalam hal ini perkembangan LQ bisa dilihat untuk suatu sektor tertentu pada kurun waktu

yang berbeda, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Hal ini bisa membantu melihat kekuatan/ kelemahan wilayah tertentu dengan wilayah yang lebih luas.

e. Analisis Spasial

Proses perencanaan pengembangan wilayah selalu berhadapan dengan obyek-obyek perencanaan yang memiliki sifat keruangan (*spasial*). Oleh karenanya dalam analisis spasial perencanaan wilayah, analisis spasial menjadi sangat penting (Rustiadi, dkk, 2011). Dari pandangan geografis spasial adalah segala hal yang menyangkut lokasi atau tempat, definisi suatu tempat atau lokasi sendiri adalah secara geografis sangat jelas, tegas dan lebih terukur karena setiap lokasi di atas permukaan bumi dalam ilmu geografi dapat diukur secara kuantitatif (Rustiadi, dkk, 2011).

Istilah pendekatan keruangan merupakan istilah sangat dikenal oleh mereka yang mengenal studi geografi dengan baik. Definisi pendekatan keruangan adalah suatu metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang yang dalam hal, ini variabel ruang mendapat posisi utama dalam setiap analisis (Sabari, 2010). Sedangkan kombinasi antara keruangan dan analisa ekologi disebut analisa kompleksitas wilayah. pada analisa sedemikian ini wilayah tertentu didekati atau dihampiri dengan pengertian areal (*differentiation*) yaitu suatu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain, oleh karena terdapat permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut (Bintarto dan Hadisumarno, 1991).

Analisis spasial dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi kawasan KEDUNGSAPUR, berdasarkan hasil perhitungan analisis pertumbuhan ekonomi, analisis ketimpangan wilayah, analisis tipologi wilayah dan analisis sektor basis dan selanjutnya menggunakan analisis spasial pendekatan komparasi keruangan, yang disesuaikan dengan tema dan tujuan penelitian. Yang menjadi tekanan analisis komparatis keruangan adalah perbandingan antar wilayah satu dengan wilayah yang lain, maka minimal harus ada dua wilayah yang harus diteliti. Tujuan

praktisnya untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan yang ada masing-masing wilayah dalam hal yang sama sehingga dapat diketahui upaya menentukan kebijakan pengembangan wilayah lebih lanjut Sabari, 2010).

1.9 Definisi Operasional Variabel

Untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi keruangan di daerah penelitian, maka ditentukan variabel-variabel terpilih yang diasumsikan mampu menggambarkan serta menjelaskan potensi sumber daya yang ada di daerah kawasan KEDUNGSAPUR. Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu 1) *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB), 2) pertumbuhan ekonomi, 3) pendapatan perkapita dan 4) jumlah penduduk atau kepadatan penduduk, dengan unit analisisnya kabupaten/ kota yang tergabung dalam kawasan KEDUNGSAPUR;

a. Pertumbuhan Ekonomi

Adalah kenaikan total PDRB atau sektor tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 2002). Cara menghitungnya yaitu total PDRB atau sektor pada tahun akhir dikurangi total PDRB atau sektor pada tahun awal dibagi total PDRB atau sektor pada tahun awal dikalikan seratus persen dengan hasil dalam persentase (%). Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi bernilai negatif berarti kegiatan perekonomian menunjukkan penurunan, sebaliknya jika tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut bernilai positif berarti kegiatan perekonomian mengalami peningkatan.

b. *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) ADHK 2000

Adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (Tarigan, 2005). Guna menghindari adanya fluktuasi kenaikan harga atau inflasi, PDRB yang dipakai adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dengan ukuran jutaan rupiah.

c. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita*

Adalah total PDRB pertahun dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama (Tarigan,2005). Satuan yang digunakan adalah rupiah.

d. Jumlah Penduduk

Adalah akumulasi dari jumlah unit terkecil sampai unit terbesar yang menjadi kesatuan dalam membentuk populasi manusia dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.

1.10 Batasan Operasional

Agar penelitian sesuai dengan kerangka pemikiran maka batasan masalah yang digunakan adalah:

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keruangan

Konsep kutub pertumbuhan (*growth pole*), yang terpusat dan mengambil tempat (kota) tertentu sebagai pusat pengembangan yang diharapkan menjalarkan perkembangan kepusat-pusat yang tingkatnya lebih rendah, dalam penelitian ini yang menjadi kutub pertumbuhan di kawasan KEDUNGSAPUR adalah Kota Semarang. Secara fungsional Kota Semarang adalah suatu lokasi dimana terdapat konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar daerah belakangnya. Secara geografis Kota Semarang adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga mempunyai pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada dikota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha–usaha tersebut.

Dalam konsep ini terdapat istilah *spread dan trickling down* (penjalaran dan penetasan) serta *backwash dan polarization* (penarikan dan pemusatan). Proses ini mempertinggi aglomerasi ekonomi, semakain besar konsentrasinya itu makin banyak penduduk, makin banyak kegiatan yang dilakukan dan makin

banyak barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kota tersebut. Gejala inilah yang memberikan semua penjalaran atau penetesan dan penarikan atau pemusatan..

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana factor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Jadi teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu kriteria yang logis mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi (Boediono, 1992)

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonom wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu system spasial suatu bangsa atau negara. Ada beberapa variabel yang dapat dipilih sebagai indikator atau pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu peningkatan dalam kemakmuran suatu wilayah, disini pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan suatu keluaran wilayah, peningkatan ini meliputi baik kapasitas produksi ataupun volume riil produksi (Adisasmita, 2005)

d. Teori Pembangunan Ekonomi

Sadono Sukirno (1985) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

e. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi lokal berorientasi pada proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru dan trasformasi pengetahuan (Adisasmita, 2005).

f. Teori *Indeks Williamson* (Ketimpangan Wilayah)

Ketimpangan pembangunan yang terjadi antar wilayah di suatu daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Menurut (Syafrizal, 2008) ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan daerah ini yang pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju (*developregion*) dan wilayah terbelakang. (*underdeveloped region*).

g. Teori *Tipologi Klassen* (Tipologi Ekonomi Wilayah)

Pendekatan tipologi wilayah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur ekonomi masing-masing daerah. Serta mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal.

h. Teori LQ (*Location Question*)

Digunakan untuk menentukan apakah suatu sektor ekonomi termasuk dalam sektor basis ataukah sektor non basis disuatu daerah dalam periode tertentu. Dibagi dalam dua kegiatan yaitu: 1) kegiatan basis (*basic activities*) kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke tempat diluar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, atau memasarkan barang dan jasa kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan, 2) kegiatan bukan basis (*non basic activities*) kegiatan yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, kegiatan ini tidak mengekspor barang jadi, luas lingkup produksi mereka dan daerah pasar mereka bersifat lokal.

i. Analisis Spasial

Analisis spasial lebih terfokus pada kegiatan investigasi pola-pola dan berbagai atribut atau gambaran didalam studi kewilayahan, dan dengan menggunakan pemodelan berbagai keterkaitan untuk tujuan meningkatkan pemahaman dan prediksi atau peramalan. Sebagai obyek analisis, data dan informasi spasial memiliki karakteristik tertentu dan memerlukan pendekatan khusus dalam proses analisisnya dibandingkan dengan data dan informasi non spasial (Ernan Rustiadi, dkk, 2011). Pendekatan yang digunakan dalam analisis spasial pertumbuhan ekonomi kawasan strategis KEDUNGSAPUR adalah pendekatan komparasi wilayah, oleh karena yang menjadi tekanan analisis pendekatan komparasi wilayah, maka yang dilakukan adalah membandingkan masing-masing kabupaten/ kota yang termasuk dalam kawasan KEDUNGSAPUR. Yang tujuannya antara lain untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing wilayah dalam hal yang sama, sehingga dapat dilakukan pembuatan peta tematik pertumbuhan ekonomi kawasan KEDUNGSAPUR.